

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA kepada kita sehingga penyusunan Rencana Strategik Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Periode Tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategik ini disusun dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan perekonomian, peningkatan daya saing, transparansi, demokratis dan desentralistis yang didukung oleh Sistim Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Disamping itu, dengan adanya rencana strategik dimaksudkan sebagai acuan semua pihak di dalam mengembangkan peternakan dan sebagai dasar pengukuran kinerja dinas, serta pedoman pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategik ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga Rencana Strategik ini dapat bermanfaat.

Mataram, Desember 2008

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Drh. H.ABDUL SAMAD

NIP. 080 071 934

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD	4
1. Kedudukan	4
2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
3. Struktur Organisasi	4
4. Sumberdaya Aparatur	5
4. Prasarana dan Sarana	5
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
1. Kebijakan dan Program	7
2. Kapasitas Tehnis Sumberdaya Aparat	7
3. Masyarakat Peternak	7
4. Kelembagaan Peternak	8
5. Swasta Pengusaha	8
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	9
3. Strategi dan Kebijakan	10
4. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan SKPD	13
5. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN	15
1. Program dan Kegiatan APBD	15
2. Program dan Kegiatan APBN	15
3. Indikator, Sasaran dan Hasil dari Program dan Kegiatan	17
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD	18
BAB VII. PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peran strategis sub sektor Peternakan dalam rangka Pembangunan Ekonomi Daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah 1). Sebagai daerah sumber ternak bibit dan ternak potong Nasional, 2). Sumber pendapatan dan penghasilan utama masyarakat. 3). Sebagai investasi masyarakat seperti modal haji, tabunagan dan biaya pendidikan, 4). Sumber protein hewani yang sangat berguna bagi kecerdasan, prestasi dan mencegah gizi buruk, 5). Penyediaan lapangan kerja dan lapangan Usaha masyarakat, 6). Kelestarian lingkungan berupa energi gas bio dan pupuk organik, 7). Home industri dan bahan baku industri pengolahan, 8). kontribusi PDRB 14,27 % dari sektor Pertanian NTB dan 9). Sumber Pendapatan Asli Daerah NTB.

Salah satu komoditas unggulan daerah pada sub sektor peternakan adalah ternak sapi. Beberapa keunggulan komparatif dan daya saing ternak sapi NTB antara lain adalah 1). Jumlah populasi dan peternak sangat besar, 2). Fertilitas tinggi, 3) Jinak dan adaptasi lingkungan yang baik, 4). Kualitas karkas tinggi dan 5) Bebas beberapa penyakit hewan menular strategis.

Pengembangan sapi di NTB sangat potensial, prospektif dan menguntungkan, hal ini didukung populasi, budaya pelihara sapi di masyarakat, ketersediaan lahan dan pakan, kelembangaan kandang kolektif, permintaan pasar yang tinggi didalam dan luar daerah serta adanya kebijakan Pusat yang menetapkan NTB sebagai salah satu sumber ternak sapi bibit dan ternak potong Nasional.

Keuntungan lain usaha peternakan sapi yaitu hasil produksi kotoran yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pertanian organik (berupa pupuk kompos), bahan baku aneka produk pangan, kerajinan kulit dan sebagai tenaga kerja, kesemua ini merupakan multiplier efek peternakan terhadap upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Visi Pemerintah Provinsi NTB periode 2009 – 2013 yaitu Terwujudnya Masyarakat NTB yang Beriman dan Berdayasaing (NTB BerSaing). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah daerah menetapkan 5 (lima) misi utama yang perlu dipedomani dalam pembangunan di NTB yaitu 1). Mengembangkan masyarakat madani yang berakhlak,

menghormati pluralitas dan kesetaraan jender, 2). Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas, 3). Menumbuhkan ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, 4). Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan penerapan IPTEK dan 5). Menegakkan supremasi hukum, pemerintahan yang bebas KKN dan memantapkan ekonomi daerah.

Mengacu Visi dan Misi tersebut diatas, maka pembangunan peternakan Tahun 2009-2013 harus mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki secara optimal. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sesuai tugas pokok dan fungsinya dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut merencanakan pembangunan peternakan yang dituangkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA).

Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan periode Tahun 2009-2013.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dan landasan ideal penyusunan Rencana Strategik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut :

1. TAP. MPR Nomor: IV /MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999/2004, yang mengamanatkan bahwa pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
5. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisikan pedoman dalam rangka memantapkan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013.

3. Maksud dan Tujuan

Perencanaan Strategik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan peternakan kearah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
- 2) Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan berbagai komponen pembangunan berbasis peternakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
- 3) Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
- 4) Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
- 5) Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja dan dengan pelaku agribisnis berbasis peternakan.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut ; Pendahuluan yang berisi kondisi umum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, Landasan Penyusunan, Visi, Misi dan Faktor Penentu Keberhasilan, Tujuan dan Sasaran, Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang berisi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

1. Kedudukan

Berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, pasal 35 ayat 1,2 dan 3 yaitu :

- 1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebagaimana telah diatur dalam pasal 36 (ayat 1 dan 2) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2008 bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan
- 2). Perencanaan Program dan kegiatan dibidang peternakan.
- 3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan.
- 4). Pengkoordinasian dan pembinaan teknis dibidang peternakan.
- 5). Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang peternakan.
- 6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- 1). Kepala Dinas.

- 2). Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3). Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan.
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
 3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan.
- 4). Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak, terdiri dari :
 1. Seksi Perbibitan Ternak.
 2. Seksi Ternak Ruminansia.
 3. Seksi Ternak Non Ruminansia.
- 5). Bidang Usaha Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Usaha.
 2. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan.
 3. Seksi Pemasaran.
- 6). Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan Hewani.
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Higienis Sanitasi dan RPH.
 3. Seksi Zoonosi dan Kesejahteraan Hewan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , terdiri dari :
 1. Balai Inseminasi Buatan.
 2. Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner.
 3. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 237 orang terdiri dari PNS 106 orang, CPNS 81 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) 47 orang, Honor Daerah 3 orang. Sedangkan tenaga teknis yang bertugas di lapangan berjumlah 472 orang terdiri dari Dokter Hewan 61 orang, Sarjana Peternakan 141 orang, Paramedis dan Penyuluh Peternakan 137 orang dan Petugas Inseminator 133 orang.

5. Prasarana dan Sarana

Sarana dan Prasarana Peternakan yang dapat difungsikan sebagai unit pelayanan, bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat, sebagai berikut :

No.	Uraian	Lokasi		Jumlah (unit)
		P. Lombok	P. Sumbawa	
1.	Pos Kesehatan Hewan	27	25	52
2.	Laboratorium Type B	1	0	1
3.	Laboratorium Type C	3	3	6
4.	Holding Ground	1	2	3
5.	Pasar Hewan	9	4	13
6.	UPT Inseminasi Buatan	1	0	1
7.	Pos Inseminasi Buatan	9	6	15
8.	Rumah Sakit Hewan	1	0	1
9.	Rumah Potong Hewan	24	9	33
10.	Rumah Potong Modern	1	0	1
11.	Pembibitan Sapi Brangus	1	0	1
12.	Pembibitan HMT & Ternak	1	2	3

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Grand Strategi (Strategi) dalam rangka pencapaian tujuan dan sararan pembangunan Provinsi NTB sebagai Bumi Sejuta Sapi adalah :

1. Rumpun Hijau berintegrasi dalam Pengembangan Bumi Sapi
2. Sapi merupakan pengungkit komoditi ternak lain dan komoditi rumpun hijau di NTB.

Berdasarkan hasil analisis situasi peternakan sapi di NTB menunjukkan bahwa beberapa isu strategis yang dihadapi dalam rangka menjadikan NTB sebagai provinsi Bumi Sapi adalah :

1. Kebijakan dan Program yang belum fokus yaitu :

- a. Pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah.
- b. Sistem/model pemberdayaan peternakan yang berpihak pada masyarakat.
- c. Kebijakan penguatan status lahan penggembalaan ternak rakyat.
- d. Kebijakan Rumpun Hijau mendukung program NTB Provinsi Bumi sapi.
- e. Pendataan populasi dasar sapi kurang akurat .
- f. Sinergi/kolaborasi antar Instansi terkait (Distan, Disbun , BPTP dll.).

2. Kapasitas Teknis Sumberdaya Aparat terbatas.

- a. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak .
- b. Perlindungan pejantan unggul dan betina produktif (grading dan sertifikasi).
- b. Angka kelahiran ternak masih rendah (54,2 % induk produktif) dan angka kematian anak masih tinggi (12,5 % dari pedet).
- c. Kejadian kasus beberapa penyakit hewan menular.
- d. Kemampuan transformasi tehnologi (breeding, Penyakit) kurang.
- e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan penyediaan produk yang ASUH, menyangkut sistim pemotongan, sarana dan prasarana RPH dan tehnologi pasca panen.

3. Masyarakat Peternak.

- a. Beternak masih dianggap sebagai usaha sampingan .
- b. Pemasaran ternak pada saat butuh uang dan tidak berorientasi harga.
- c. Akses permodalan sulit dan belum ada kredit khusus untuk sapi.
- d. Peternak sebagian besar sebagai pengadass dan tidak punya otoritas dalam menentukan penjualan ternak.
- e. Usaha peternakan sapi hanya berorientasi produksi daging dan belum dipadukan dengan usaha susu, tenaga kerja, energi, pupuk dan wisata.

- f. Keamanan usaha sapi kurang karena banyak maling dan belum ditunjang awareness, advokasi, tertib RPH (administrasi, teknis, Cap daging , razia daging legal dan ilegal dan regulasi).

4. Kelembagaan Peternak

- a. Kelompok Peternak
 - 1. Organisasi kelompok lemah dan mudah bubar, terutama disebabkan masalah tanah & Pamswakarsa.
 - 2. Administrasi kelompok kurang (pencatatan ternak lahir, sakit, mati dan jual beli).
 - 3. Belum adanya kader teknis dalam setiap kelompok (kader IB, kesehatan hewan dan vaksinasi) .
 - 4. Belum semua kelompok memiliki aturan/regulasi/awig-awig (pertemuan anggota, pembagian tugas, jadwal ronda dan sanksi).
- b. Kelompok Kandang Kolektif.
 - 1. Kesulitan penyediaan lahan untuk lokasi kandang.
 - 2. Belum semua kelompok memiliki awig-awig/aturan.
 - 3. Sanitasi lingkungan kandang kelompok kurang.

5. Swasta/Pengusaha

- a. Pengusaha tidak tertarik melakukan usaha pembibitan dan hanya berminat pada usaha perdagangan ternak.
- b. Tidak peduli terhadap proses produksi dan hanya menunggu hasil.
- c. Coorparate Social Responsibility (CSR) kurang.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Peternakan dan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dapat dirumuskan sebagai berikut :

“ NTB BUMI SEJUTA SAPI “

Bumi sapi dimaksudkan adalah :

- 1) Kesatuan wilayah NTB, dimana hampir di semua Desa terdapat sapi dan mengakar di masyarakat.
- 2) Sejarah sebagai pengekspor sapi ke Hongkong dan Singapura.
- 3) Populasi sangat besar dan termasuk 8 besar Nasional
- 4) Daya dukung sumberdaya alam tersedia.
- 5) Pusat pengembangan sapi hissar dan pembibitan sapi bali nasional.
- 6) Bebas penyakit hewan menular strategis.
- 7) Modal sosial, modal haji, pendidikan, perkawinan dan lain-lain.
- 8) Output sektor pertanian dengan nilai jual sangat tinggi.
- 9) Output berupa produk organik dan pengendali lingkungan.
- 10) NTB surplus sapi dan sumber sapi bibit dan sapi potong Nasional.
- 11) NTB bersaing karena NTB Bumi sapi

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah :

- 1) Menjadikan NTB sebagai Bumi Sapi.
- 2) Mengembangkan Budidaya peternakan sapi terintegrasi dengan sektor lain.
- 3) Menanggulangi penyakit hewan menular strategis baik yang menular pada hewan maupun dari hewan ke manusia (Zoonosis).
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana strategis bidang peternakan.
- 5) Mendukung ketahanan pangan , khususnya diversifikasi pangan yang berkualitas dan bergizi sebagai upaya penanggulangan gizi buruk.
- 6) Meningkatkan SDM berkeualitas melalui penyediaan protein hewani.

2. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

- a. Menjadikan NTB sebagai Provinsi Bumi sapi.

- b. Mempertahankan NTB tetap unggul dan bersaing dengan daerah lain secara teknis dan sosial budaya.
- c. Meningkatkan produksi, produktivitas ternak dan nilai tambah dengan tetap menjaga kelestariannya.
- d. Menyediakan pangan asal ternak yang cukup dan memenuhi standar gizi yang berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan & prestasi.
- e. Menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha masyarakat.
- f. Meningkatkan investasi dan kerjasama Dalam dan Luar Negeri.
- g. Mengembangkan pupuk organik dalam rangka meningkatkan harga jual produk pertanian.
- h. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup peternak.

B. Sasaran

- a. Meningkatnya populasi ternak sapi rata-rata 6 %/tahun, produksi anak sapi rata-rata 148.700 ekor/tahun dan populasi satuan ternak sebesar 4 %/tahun.
- b. Terkendalinya kasus kejadian penyakit hewan menular strategis.
- c. Meningkatnya produksi daging 4 %/tahun dan telur 2 %/tahun.
- d. Meningkatnya konsumsi daging 2,5 %/tahun dan telur 5 %/tahun.
- e. Meningkatnya pemasaran hasil peternakan di pasar lokal dan nasional.
- f. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja rata-rata 4 %/tahun atau rata-rata 12.000 orang/tahun.
- g. Meningkatnya kerjasama dengan Pemerintah Jepang dan Australia dan investasi dibidang peternakan.
- h. Berkembangnya sentra pengolahan pupuk organik dan home industri pengolahan hasil peternakan.
- i. Meningkatnya nilai tambah bruto sub sektor peternakan 4 %/ tahun.

3. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Untuk mewujudkan NTB sebagai Provinsi Bumi Sapi diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Populasi dan Kualitas Ternak Sapi.
Strategi peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi dilakukan melalui peningkatan angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengendalian pemotongan sapi betina produktif dan jantan muda, pengendalian pengeluaran ternak, penyebaran ternak unggul, memperbaiki struktur populasi, peningkatan produksi, mutu ternak sapi secara dan pengendalian penyakit hewan menular.
2. Membangun Sinergi dan Integrasi Instansi Rumpun Hijau.
Membangun sinergi dan integrasi Rumpun Hijau dimaksud adalah mengembangkan sentra pembibitan dan penggemukan sapi (Beef Cattle Centre) terintegrasi sektor lain

yang didukung oleh Dinas /Instansi Rumpun Hijau, Perguruan Tinggi, BPTP, petani peternak dan unsur terkait lainnya).

3. Mengkoordinasikan berbagai pola/model penyebaran dan pengembangan ternak yang dilakukan oleh berbagai Dinas/Instansi, Lembaga Non Pemerintah/Donor.
4. Penetapan Status Padang Pengembalaan Ternak Rakyat.
Untuk memberikan ruang pengembangan usaha peternakan rakyat dipandang perlu adanya suatu kebijakan pemerintah yang mengatur dan menetapkan lokasi tempat pengembalaan ternak sapi rakyat.
5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur .
Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat perlu dilakukan pendidikan bagi aparat (teknis, motivasi dan komunikasi), pengembangan sistem insentif bagi petugas serta meningkatkan jumlah aparat teknis yang langsung melayani masyarakat.
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak.
Merupakan upaya memperkuat kapasitas kelompok peternak dan kelompok peternak kandang kolektif melibatkan peran aktif petugas teknis lapangan (Dokter Hewan, Sarjana Peternakan dan PPL), paramedis, Inseminator, Sarjana Membangun Desa (SMD), Sarjana pendamping dan lain-lain. Pengembangan kelembagaan peternak tersebut perlu ditingkatkan dari aspek kuatintatif dan kapasitasnya, serta diarahkan pada pembentukan kawasan sentra produksi sapi potong.
7. Peningkatan Peranserta Swasta Membangun Sektor Budidaya Ternak.
Mendorong pengusaha/swasta untuk melakukan kegiatan pembibitan dan penggemukan (tidak hanya fokus pada usaha jual beli) serta memanfaatkan CSR untuk pengembangan kerjasama kemitraan dengan kelompok peternak/ Kelompok Kandang Kolektif.
8. Peningkatan Akses Masyarakat pada Modal, Tehnologi dan Informasi.
Untuk meningkatkan kapasitas (pemberdayaan) peternak perlu dilakukan upaya fasilitasi penguatan modal melalui lembaga perbankan/perkreditan dan meningkatkan alih tehnologi melalui pelatihan teknis dan kewirausahaan, magang peternak, bimbingan dan pembinaan.
9. Pengembangan Infrastruktur Peternakan.
Untuk mensukseskan rencana menjadikan NTB sebagai provinsi surplus sapi diperlukan sarana dan prasarana pendukung untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat seperti Pos Keswan, Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, Unit Pelayanan IB, Kandang Kolektif, Embung, Sumur Bor, peralatan pengolahan pakan serta sarana lain yang diperlukan.

B. Kebijakan

Kebijakan operasional menjadikan NTB Provinsi Bumi Sapi pada hakekatnya merupakan upaya memfasilitasi, merekayasa, menstimulasi, melayani dan mendorong

berkembangnya sistem pembangunan peternakan yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara operasional kebijakan tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah NTB dan pada tahap awal diarahkan pada wilayah potensial sentra produksi sapi untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dan sekaligus jendela informasi NTB Provinsi Bumi Sapi.

Kebijakan operasional yang ditempuh untuk menjadikan NTB sebagai Provinsi Bumi Sapi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sentra perbibitan sapi terintegrasi.
Pengembangan kawasan ternak sapi yang berintegrasi dengan komoditi lain perlu dilakukan dalam rangka mendorong pengembangan dan perluasan cakupan kegiatan usaha integrasi dengan komoditi perkebunan, kehutanan, tanaman pangan, dan lain-lain yang secara teknis dapat saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diharapkan dapat terwujudnya kesepahaman kerjasama dengan instansi terkait baik lintas sub sektor maupun sektor dalam melaksanakan pembinaan kawasan perbibitan sapi (Beef Cattle Centre) sebagai upaya mengoptimalkan sumberdaya pembangunan di pedesaan.
2. Pengembangan pakan ternak
Pengembangan pakan sapi diarahkan untuk menyediakan pakan ternak sapi yang cukup dan berkelanjutan sepanjang musim melalui optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian, pembibitan dan penanaman Hijauan Makanan Ternak dan perbaikan padang penggembalaan (perbaiki kualitas pakan, pembuatan embung dan sumur bor).
3. Pengendalian Penyakit Hewan Menular
Darahkan pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular melalui pengawasan lalu lintas hewan dan peredaran obat-obatan dan vaksin, pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan pelayanan kesehatan ternak melalui pemberdayaan Pos Kesehatan Hewan (Pos Keswan).
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Kebijakan peningkatan penyediaan Daging yang ASUH bagi masyarakat akan dilakukan melalui perbaikan sistem pemotongan ternak (teknis dan administrasi), melengkapi sarana dan prasarana pendukung Rumah Potong Hewan dan peningkatan teknologi pasca panen.
5. Peningkatan Permodalan .
Kebijakan fasilitasi permodalan diarahkan dalam rangka peningkatan kemampuan produksi dan produktivitas peternak melalui fasilitasi akses pemanfaatan secara

optimal skim kredit Perbankan dan mendorong pemerintah untuk memberikan kredit khusus untuk pengembangan usaha peternakan sapi.

4. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan SKPD

a. Dana Desentralisasi/APBD

Dukungan pembiayaan pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan di NTB bersumber dari APBD I selama 5 tahun ke depan (2009 – 2013) diharapkan sebesar Rp. 84.009.193.995,- atau meningkat rata-rata 10 % per tahun dari kondisi anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 13.760.494.340,-

b. Dana Dekonsentrasi/APBN

Dukungan pembiayaan pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan di NTB bersumber dari dana Dekonsentrasi/APBN selama 5 tahun ke depan (2009 – 2013) diharapkan sebesar Rp. 41.270.476.000,- atau meningkat rata-rata 10 % per tahun dari kondisi anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 6.760.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sumber Dana	Tahun (Rp/000)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Dirjen Peternakan	5.755.000,-	6.330.500,-	6.963.550,-	7.659.905,-	8.425.895,-
2	Dirjen PLA	450.000,-	495.000,-	544.500,-	598.950,-	658.845,-
3	Dirjen P2HP	555.000,-	610.500,-	671.550,-	738.705,-	812.575,-
Total		6.760.000,-	7.436.000,-	8.179.600,-	8.997.560,-	9.897.316,-

c. Dana Tugas Pembantuan/APBN

Dukungan pembiayaan pelaksanaan Program Pembangunan Peternakan di NTB bersumber dari dana Tugas Pembantuan/APBN selama 5 tahun ke depan (2009 – 2013) diharapkan sebesar Rp. 29.786.782.900,- atau meningkat rata-rata 10 % per tahun dari kondisi anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 4.879.900.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sumber Dana	Tahun (Rp/000)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Dirjen Peternakan	1.305.000,-	1.435.500,-	1.579.050,-	1.736.955,-	1.910.650,-
2	Dirjen PLA	2.674.000,-	2.941.400,-	3.235.540,-	3.559.094,-	3.9115.003,-
3	Dirjen P2HP	900.000,-	990.000,-	1.089.000,-	1.197.900,-	1.317.690,-
Total		4.879.000,-	5.366.900,-	5.903.590,-	6.493.949,-	7.143.343,-

5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan SKPD

Sumber-sumber Penerimaan Daerah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berasal dari :

1. Retribusi Leges.
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari : Houlding Ground, Poskeswan Swadaya dan RSH Gunungsari, Uji Laboratorium Keswan
3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terdiri dari : Penjualan Sapi Tidak Layak Bibit BPT-HMT Serading, Penjualan Sapi Fattening, Penjualan semen Beku di BIB Banyumulek, Penjualan HMT di BPT-HMT Serading, Penjualan susu sapi perah dan Penjualan ayam pedaging
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah antara lain : Penerimaan Komisi Pengadaan Barang/Jasa

b. Arah Kebijakan Belanja SKPD

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB bahwa Arah Kebijakan Belanja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dititik beratkan pada upaya Pengembangan Ekonomi Pedesaan Berbasis Sumberdaya Lokal dan Mengembangkan Investasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, serta mengembangkan infrastruktur strategis dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang peternakan.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Program dan Kegiatan APBD

- a. Program Pelayanan Administrasi Kantor;
 - Penyediaan jasa surat menyurat, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa komunikasi, air dan listrik.
 - Penyediaan jasa keuangan, administrasi dan teknis perkantoran.
 - Penyediaan peralatan rumah tangga dan penerangan bangunan .
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - Penyediaan makan minum dan operasional panitia pengadaan barang dan jasa .
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - Pemeliharaan/Rehab bangunan gedung kantor.
 - Pemeliharaan/operasional kendaraan Dinas.
- c. Program Peningkatan SDM Aparatur;
 - Pembinaan KORPRI Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d. Program Peningkatan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja & Keuangan;
 - Penyusunan laporan capaian kinerja, bulan, triwulan dan tahunan.
 - Penyusunan RKA SKPD, DPA SKPD dan laporan Absensi.
 - Peningkatan tertib inventaris barang daerah.
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
 - Pemberdayaan usaha peternak sapi penggemukan.
- f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - Pembinaan pemasaran dan pengolahan hasil peternakan.
 - Eksposisi dan promosi hasil peternakan.
 - Survey perkembangan harga bidang peternakan.
- g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
 - Pengembangan dan pembinaan perbibitan ternak UPTD Serading.
 - Pengembangan dan pembinaan perbibitan Hijauan Makanan ternak UPTD Serading.
 - Usaha produksi susu sapi perah di Banyumulek.
 - Pengembangan pembibitan sapi Brangus Amor-Amor.
 - Usaha pemeliharaan ternak Ayam potong di Banyumulek.
 - Pemeliharaan sapi pejantan Unggul dan produksi semen beku oleh BIB Banyumulek.
 - Pengembangan Hijauan Pakan Ternak di Banyumulek.
 - Pengembangan pembibitan sapi Brangus Amor-Amor.

- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
 - Pengadaan vaksin dan pengendalian penyakit hewan menular.
 - Peningkatan pelayanan laboratorium Type B Banyumulek.
 - Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan Gunung Sari.
 - Dukungan kerjasama ACIAR bidang kesehatan hewan.
- i. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
 - Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.
 - Uji cemaran microba produk hasil peternakan.
 - Pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan.
 - Penyusunan statistik peternakan.
 - Pembinaan dan pengelolaan Rumah Potong Hewan.
- j. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan.
 - Pembinaan kelompok peternak dan penyuluh pertanian lapangan.
 - Dukungan kerjasama pengembangan sapi potong JICA Jepang.

2. Program dan Kegiatan APBN

- a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani :
 - Lumbung Ternak sapi Potong Masyarakat
 - Pengembangan Agribisnis melalui LM3
 - Pengembangan Agribisnis melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).
 - Recording dan pendataan ternak
 - Peningkatan SDM petani dan petugas
 - Sarana usaha kelompok
 - Peningkatan dan Replikasi Lembaga Keuangan Mikro.
- b) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan.
 - Fasilitasi pengembangan usaha masyarakat dibidang Peternakan (usaha pembibitan, penggemukan, kompos, usaha pakan dan jasa dibidang peternakan).
 - Penguatan modal usaha melalui fasilitas akses perkreditasi/ perbankan/ lembaga keuangan.
 - Meningkatkan investasi dan stimulasi pembentukan kelembagaan usaha peternakan.
- c) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - Peningkatan Sarana Prasarana (IB, Kesehatan Hewan, Pasar Hewan dan Kesmavet)
 - Pengembangan SDM petugas (IB, pakan, Lab dan RPH).
 - Penjaringan sapi betina produktif

- Penanganan gangguan reproduksi ternak
- Operasional pelayanan Kesehatan Hewan
- Pengelolaan Lahan Peternakan
- Pengelolaan Air untuk ternak dan pakan ternak.

3. Indikator, Sasaran dan Hasil dari masing-masing Program dan Kegiatan.

- a. Peningkatan Populasi Ternak Sapi :
 1. Pertumbuhan populasi rata-rata 6 %/tahun dan produksi anak sapi (pedet) rata-rata 148.700 ekor/tahun.
 2. Angka kelahiran meningkat dari 54,2 % menjadi 70 % dari induk sapi.
 3. Angka kematian pedet (anak sapi) menurun dari 12,5 % menjadi 7,5 % dari total kelahiran atau secara populasi menurun dari 2,63 % menjadi 1,8 %.
- b. Peningkatan populasi satuan ternak rata-rata 4 %/tahun.
- c. Pengendalian pemotongan betina produktif dan jantan muda menurun dari 20 % menjadi 12 % dari pemotongan tercatat.
- d. Produksi daging meningkat rata-rata 4 %/tahun dan telur 2 %/tahun .
- e. Konsumsi daging meningkat rata-rata 2,5 %/tahun dan telur 5 % /tahun.
- f. Daya serap tenaga kerja meningkat rata-rata 4 %/ tahun atau rata-rata 12.000 orang/tahun
- g. Meningkatnya nilai tambah bruto sub sektor peternakan 4 %/ tahun.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD

Bertitik tolak dari analisis perkembangan pembangunan peternakan selama 5 tahun terakhir serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka indikator utama untuk mengukur capaian kinerja sub sektor peternakan terdiri dari asepek peningkatan populasi, produksi ternak, daging dan telur, konsumsi pangan asal ternak, daya serap tenaga kerja, pemasaran hasil peternakan dan kontribusi peternakan terhadap PDRB Provinsi NTB.

Secara terinci indikator capaian kinerja pembangunan sub sektor peternakan periode 2009-2013 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	DATA 2008	TREND	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA				
					2009	2010	2011	2012	2013
1	Peningkatan Populasi Sapi	Ekor %	507.836 4	6	530.181 4,4	556.690 5	590.091 6	631.398 7	681.909 8
2	Peningkatan Induk dewasa	Ekor	197.040		205.710	215.996	228.955	244.982	264.581
3	Peningkatan Kelahiran Sapi	% Ekor	54,20 106.796	3,16	57,36 117.995	60,52 130.721	63,68 145.799	66,84 163.746	70,00 185.207
4	Penurunan Kematian Sapi	% Ekor	12,50 13.349	1,00	11,50 13.569	10,50 13.726	9,50 13.851	8,50 13.918	7,50 13.890
5	Peningkatan Panen Anak sapi	Ekor	93.446		104.426	116.995	131.948	149.828	171.316
6	Pemotongan Tidak Tercatat	% Ekor	20 5.899		20 6.135	18 5.742	16 5.308	14 4.831	12 4.308
7	Peningkatan Produksi Daging	Ton	25.531	4,00	26.552	27.614	28.719	29.867	31.062
8	Peningkatan Produksi Telur	Ton	4.777	2,00	4.872	4.970	5.069	5.171	5.274
9	Peningkatan Konsumsi Daging	kg/kap	5,78	2,50	5,92	6,07	6,22	6,38	6,54
10	Peningkatan Konsumsi Telur	kg/kap	1,29	5,00	1,35	1,42	1,49	1,57	1,65
11	Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	321.260	4,00	34.110	347.475	361.374	375.829	390.862
12	Peningkatan Populasi ternak	AU	775.445	4,00	06.463	838.721	872.270	907.161	943.447

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013, akan dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif semua pihak, kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan peternakan di semua tingkatan serta terlaksananya pemerintahan yang baik (good governance).

Mataram, 27 November 2008

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drh. H. ABDUL SAMAD
NIP. 080 071 934